

Arah Pengembangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural

Akmal Hawi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Email: akmalhawi_uin@radenfatah.ac.id

Qolbi Khoiri

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia
Email: khoiri_qolby@gmail.com

Abstrak

Agama, pemahaman keagamaan, sikap keberagaman adalah tiga pengertian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Agama adalah persoalan ketuhanan yang diturunkan kepada manusia untuk dipahami, dijadikan pegangan dan prinsip mengatur kehidupannya. Agama sesungguhnya secara normatif adalah ajaran suci, penuh kedamaian, kemuliaan dan menghargai kemanusiaan. Masalah mendasar menyangkut persoalan keagamaan antar pemeluk agama satu dengan lainnya. Pendidikan Agama diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sehingga peran pendidikan agama menjadi sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara dalam bingkai prinsip-prinsip keadilan, toleransi, kerjasama, kerja keras, dan saling memahami perbedaan.

Kata Kunci: Islam, Wawasan Multikultural, Pendidikan Eklusitas

Wilayah kebenaran penafsiran agama sering menggunakan standar ganda; kebenaran dianggap jauh dari kebenaran. Padahal pemilik kebenaran sejati adalah Tuhan. Berangkat dari pemahaman ini, maka kebenaran yang ditafsirkan selama ini hanyalah kebenaran yang relatif. Benar bahwa dalam masing-masing agama diajarkan untuk membela, menyebarkan, dan patuh pada kebenaran agama. Tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosiologis, antropologis, historis, dimana umat itu berada.

Salah satu aspek penting mengedepankan keberagaman yang inklusif dan pluralis sebenarnya adalah pendidikan. Sayangnya, aspek pendidikan (agama) selama ini kurang tersentuh, karena hanya dipandang sebagai persoalan pinggiran yang

tidak signifikan. Padahal, pendidikan (dalam artian umum) adalah basis atau dasar untuk menciptakan SDM pembentukan karakter suatu bangsa.

Pendidikan agama selama ini memang kurang bisa diharapkan kontribusinya dalam pembentukan masyarakat yang menghargai pluralisme, dan cenderung tidak menunjang demokratisasi. Apalagi, selama ini guru agama di sekolah dan perguruan tinggi umumnya hanya menekankan ajaran agama yang bersifat teologis-dogmatis (Schumann, 1993, hal. 26) sehingga makin membentuk Chauvinisme rasa kebenaran pada agamanya sendiri.

Nizar Ali mengatakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah, pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang lawan konflik. Ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial, kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya. Fakta lain menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendiri lah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barangtentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa (Ilyas, 2009, hal. ix).

Dampaknya, pengajaran agama kurang menyentuh aspek realitas sosial yang sesungguhnya, tidak sampai pada persoalan aksi nyata dari proses perilaku keagamaan. Pendidikan agama cenderung menekankan eksklusifitas kebenaran agama, mengabaikan aspek pluralitas serta inklusifitas (Abdullah, 2000). Maka, model pendidikan agama gaya lama cenderung eksklusif, dogmatis, kembali ke masa lalu kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu didekonstruksi atau dibongkar.

Pendidikan agama haruslah diubah orientasi dan metodologinya. Pendidikan agama seyogyanya bukan hanya berisi pengajaran tentang ajaran-ajaran agama dan kepercayaan ketuhanan semata. Namun, pendidikan agama harus memaparkan realitas sosial dan problem empirik, bervisi emansipatoris, dan menghindarkan diri dari indoktrinasi.

Pendidikan agama tidak boleh kehilangan dimensi multikultural nya, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga

hanya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional (Ilyas, 2009, hal. x).

Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya pendidikan agama yang multikultural, yaitu model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, toleransi, tenggang rasa, kebajikan, menghormati perbedaan, dan sikap-sikap kemanusiaan yang mulia lainnya.

Makna Multikulturalisme

Fakta keragaman baik agama maupun budaya di Indonesia masih merupakan isu sentral yang patut ditelaah secara lebih serius dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping sebagai khazanah peradaban bangsa yang patut dilestarikan dan dikembangkan, kondisi keragaman bangsa juga dapat melahirkan sebuah masalah serius, terutama dengan merebaknya “*clash of civilization*” (Scharf, 1970, hal. 56) baik dalam skala global maupun lokal.

Paham multikulturalisme, yang gerakannya dianggap relatif baru (Parekh, 1997) dapat menjadi suatu alternatif dan solusi baru bagi persoalan kemajemukan bangsa, sehingga konsep ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi agenda demokratisasi, equalitas, dan harmoni di tengah maraknya isu-isu konflik, kekerasan dan perpecahan di tengah masyarakat kita saat ini. Pembicaraan tentang multikulturalisme akan selalu dihubungkan dengan keragaman budaya, termasuk di dalamnya adalah agama. Menurut Bhikhu Parekh, multikulturalisme mengacu pada tiga hal; multikulturalisme yang berhubungan dengan budaya, merujuk pada keberagaman budaya, dan berhubungan dengan tindakan spesifik pada respon atas keberagaman tersebut (Suminto, 1985, hal. 42).

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena menurut Dwipayana, multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Lebih lanjut menurutnya, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Secara sederhana, Bhikhu Parekh menggambarkan multikultural sebagai “*a society containing several cultures*” (Suminto, 1985, hal. 45).

Namun faktanya ketika dikaitkan dengan konteks negara atau yang berkaitan dengan persatuan, kesatuan bangsa dan nasionalisme, keberagaman seakan harus tunduk pada keseragaman demi keutuhan dalam pengelolaan negara.

Fenomena inilah yang terjadi di negeri kita, dimana konteks keberagaman masih berada pada tahap pengakuan pasif, tapi belum pada tahap kerjasama atau pertukaran.

Perhatian utama dari politik multikultural menurut Hardiman (2002: xix) adalah pengabaian secara sistematis atau prinsip mayoritas dan mengakomodasi kepentingan minoritas, demi tegaknya prinsip keadilan dan kesamaan tanpa diskriminasi dihadapan hukum. Prinsip kesamaan atau keseragaman pada level tertentu bisa berbalik pada ketidakadilan jika kekhasan dan keberbedaan dari tiap individu atau kelompok diabaikan.

Senada dengan pandangan tersebut, Parekh (2000: 195) menegaskan bahwa negara perlu bersungguh-sungguh dalam memperlakukan semua masyarakatnya secara sama tapi tidak harus memperlakukan perlakuan yang serupa. Dengan perlakuan yang sama, bisa jadi minoritas malah merasa dirugikan dan didiskriminasi karena kesamaan yang tanpa batas bisa jadi justru menguntungkan mayoritas.

Tujuan Pendidikan Multikultural

Menurut Nizar Ali pendidikan multikultural adalah transfer pengetahuan tentang nilai dan pandangan hidup menghormati, menghargai, dan toleran terhadap keanekaragaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan membentuk sikap dan moralitas anti kekerasan dan kelenturan menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak, yang pada gilirannya kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat (Ilyas, 2009, hal. viii).

Selanjutnya menurut James A. Bank, pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Ilyas, 2009, hal. xi). Pendidikan itu sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk melakukan rekonstruksi sosial dengan mengembangkan *civic skill*, yakni keterampilan menjadi warga dari masyarakat demokratis yang mampu bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural menawarkan suatu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa, seperti keragaman etnis,

budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras (Tilaar, 2004, hal. 25).

Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah sebuah upaya menerjemahkan pandangan dunia pluralistik dan multikultural ke dalam praktek dan teori pendidikan. Menurut Baidhawiy, kurikulum multikultural, tidak sebagaimana kurikulum konvensional dan program tradisional, berupaya menyajikan lebih dari satu perspektif mengenai peristiwa-peristiwa sejarah atau fenomena kultural. Merespon kritik bahwa pluralisme dalam pendidikan dapat memiskinkan kurikulum yang ada, para pengajar multikulturalis berpendapat bahwa pendidikan multikultural justru sesungguhnya memperkaya kurikulum yang sudah berjalan.

Pengayaan ini dapat dilihat pada bagaimana pendidikan multikultural dapat dikembangkan. Oleh karena itu, titik berat pertama pendidikan multikultural sebenarnya terletak pada pemahaman dan upaya untuk hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusivisme kelompok agama atau budaya yang sempit (Koentjoroningrat, 1972, hal. 83). Titik berat selanjutnya terletak pada pemahaman nilai-nilai bersama (*common values*) dan upaya kolaboratif mengatasi masalah-masalah bersama: kejahatan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dengan kalimat lain, pendidikan multikulturalis tidak sekadar untuk memahami keragaman agama dan budaya, tetapi juga memahami nilai-nilai bersama yang bisa di-*sharing* sebagai dasar hidup bersama (*vivre ensemble*).

Tujuan pendidikan multikultural dengan demikian adalah untuk menanamkan simpati, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleran (*intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, hegemoni budaya ditengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Untuk itu dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. Pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi *built-in* dalam masyarakat-masyarakat beragama. Kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu

fase sejarah baru dimana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindari dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi umat beragama pada zaman modern ini.

Pendidikan Multikultural Sebagai Sebuah Model

Pendidikan Multikultural menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, sosial, dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu menagajarkan ideal-ideal inklusivitas, pluralisme, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan merupakan impretatif humanistik yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etis dan partisipasi sipil secara penuh dalam demokrasi multikultural dan dunia manusia yang beragam. Pendidikan multikultural sering disalahpahami sebagai pendidikan yang hanya memasukkan isu-isu etnik atau rasial. Isu-isu tersebut memang benar menjadi kajian penting dalam pendidikan multikultural, namun lebih dari itu juga mengedepankan isu-isu lainnya seperti relasi gender, keragaman sosial, ekonomi, perbedaan agama dan sebagainya.

Dalam hal ini ada empat pendekatan kerangka reformasi kurikulum yang ditawarkan J. A., Bank. *Pertama*, pendekatan kontributif, pendekatan yang dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktivitas-aktivitas tertentu seperti peristiwa-peristiwa tertentu dari berbagai kebudayaan.

Buku-buku cerita, cerita-cerita dari daerah-daerah atau kelompok-kelompok tertentu bisa dimunculkan dengan memberikan nuansa kepekaan dan penghormatan terhadap budaya atau nilai-nilai suku atau kelompok lain. Dalam buku pelajaran di sekolah nilai-nilai yang unik dari daerah atau kelompok tertentu perlu diperkenalkan tidak hanya diperkenalkan dalam pelajaran agama, tetapi juga dalam pelajaran lainnya. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Ilyas, 2009, hal. 35).

Kedua, pendekatan aditif, mengambil bentuk penambahan muatan-muatan, konsep-konsep ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, seperti tema-tema toleransi, ko-eksistensi, pro-eksistensi, kerjasama, saling menghargai, saling memahami antar penganut agama-agama yang berbeda.

Kurikulum pendidikan semua mata pelajaran perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kurikulum nasional dan kurikulum daerah. Hal ini dimungkinkan dalam rangka melestarikan nilai-nilai daerah tanpa menafikkan nilai-nilai budaya nasional.

Ketiga, pendekatan transformatif yang berupaya mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat dan meninjau kembali konsep-konsep, isu-isu lama, kemudian memperbaharui pemahaman dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnik.

Pendekatan aksi sosial, yaitu pengkombinasian pendekatan transformatif dengan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk melakukan perubahan sosial. Seperti yang berhubungan dengan isu-isu konflik keagamaan, dimana seseorang dituntut mampu berperan aktif memecahkan masalah sesuai dengan kapasitasnya. Keempat pendekatan ini dilengkapi oleh Geneva gay dengan disebutnya pendekatan dekonstruktif. Pendekatan ini sering dipahama sebagai kritik, interogasi, pembongkaran sekaligus rekonstruksi pengetahuan oleh para teorisi pendidikan (Koentjoroningrat, 1972, hal. 85).

Arah Pengembangan Pendidikan Agama dalam Konteks Multikultural

Saat ini pendidikan agama di sekolah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan agama tidak berdampak pada perilaku siswa setelah mengalami proses pendidikan tersebut. Meskipun di beberapa sekolah pendidikan agama diberikan dengan porsi yang cukup besar, ternyata tidak mampu mencegah anak berperilaku buruk seperti tawuran, berpikiran sempit (dogmatis), kurangnya toleransi dan menghargai orang lain. Tidak heran jika banyak orang menjadi apatis dengan pendidikan agama, dan mempertanyakan sejauh mana efektifitas mata pelajaran tersebut bagi peningkatan kesadaran siswa baik secara kultural maupun agama.

Menurut Paul Suparno (2003), banyak persoalan yang terjadi pada pendidikan agama di sekolah, diantaranya: *Pertama*, pendidikan agama terlalu ditekankan pada segi kognitif dan hafalan semata. Dampaknya, siswa mungkin bisa menjawab uji tes pada mata pelajaran tersebut, tapi tidak berdampak sama sekali dengan perubahan tingkah laku sehari-hari. Pendidikan agama kurang menekankan pada sikap hidup, nilai moral, penghayatan hidup yang dapat membantu anak mengembangkan hidupnya lebih baik.

Kedua, model pendidikan agama saat ini terlalu banyak menekankan indoktrinasi yang mengharuskan bertindak secara ketat pada satu pilihan. Dalam hal ini murid lebih banyak pasif, sementara pendidikan lebih mengarah pada “pengajaran” oleh dominasi guru. Contoh jika seorang guru mengajarkan larangan mencuri berdasarkan perintah Tuhan tanpa menjelaskan alasan dan dampak yang

ditimbulkan dari pencurian tersebut, maka siswa mungkin hanya tahu tentang larangan tersebut, tapi nilai tersebut tidak menjadi miliknya.

Ketiga, materi pendidikan agama cenderung menekankan pada ibadah normal, tapi kurang pada penghayatan dalam kenyataan. Banyak sekali ditemukan seorang guru yang mengajarkan pelajaran agama tanpa melatih siswa untuk mempraktekkan di lapangan.

Keempat, pada evaluasi akhir mata pelajaran, penilaian hanya ditekankan pada hasil pengetahuan hafalan siswa, padahal nilai agama perlu diambil dari keseluruhan proses pendidikan, seperti apakah siswa telah berperilaku agamis di sekolah. Kalau penekanan guru hanya berkuat pada aspek kognitif, maka pendidikan agama lebih cocok disebut dengan pengetahuan agama.

Kelima, pelajaran agama cenderung tidak memperkuat perkembangan tingkah laku siswa yang lebih baik karena pendidikan agama kurang dikaitkan dengan unsur kemanusiaan yang lain seperti segi emosional, spiritual, sosial, budaya, serta hidup bersama.

Keenam, kurang kuatnya dukungan suasana dan sistem yang kondusif bagi perkembangan perilaku siswa yang baik. Misalnya, jika tradisi penghargaan dan penghormatan satu sama lain di sekolah baik karena etnik, budaya atau agama yang berbeda, maka sulit diharapkan kepada siswa untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Pendidikan agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap anak, karena itu pendidikan agama tidak bisa diabaikan oleh setiap orang yang bertanggungjawab terhadap masa depan anaknya. Zakiah Darajat mengemukakan bahwa agama yang ditanamkan sejak kecil pada anak-anak, akan menjadi bagian dari unsur kepribadiannya, akan bertindak menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan agama yang menjadi kepribadian itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang atau menyelewengkan sesuatu, bukan karena dia takut ketahuan dan hukuman pemerintah dan masyarakat, melainkan takut kemarahan dan kehilangan ridha Allah yang dipercayainya. Ia akan bekerja giat untuk kepentingan sosial, negara, dan bangsa bukan ingin dipuji (Sobur, 1986, hal. 21).

Pendidikan agama yang baik bisa membantu mengembangkan pemahaman tentang multikulturalisme dalam kehidupan sosial. Pendidikan agama bisa dijadikan fundamen atau dasar mental, dasar berpikir, bersikap, serta bertindak bagi seseorang

dalam kehidupan sosialnya, sehingga terjalin keharmonisan dan rasa saling mencintai antara sesama anggota masyarakat yang majemuk.

Untuk menjadikan pendidikan agama bisa mengembangkan nilai-nilai multikultural seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras, diperlukan arah pengembangan sebagai berikut:

1. Nilai Toleransi

Toleransi merupakan salah satu prinsip dalam masyarakat madani, disamping prinsip-prinsip lain, yakni inklusif, egaliter, dan demokrasi (Baidhawiy, 2005, hal. 79). Toleransi merupakan salah satu inti ajaran Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain seperti kasih sayang, kebijaksanaan, kemaslahatan, dan keadilan. Toleransi merupakan kunci perdamaian, kedamaian, persamaan, dan progresifitas. Toleransi merupakan sikap yang harus dikembangkan dalam pendidikan agama Islam untuk membangun hubungan yang harmonis, menjauhkan sikap yang kaku, pertentangan, dan menahan diri dalam menyikapi perbedaan baik agama, ras, etnis, kemampuan bahasa. Menurut Yunan Nasution yang dikutip oleh Sufianto, ada empat sikap yang harus dimiliki seorang muslim dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Harus menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan yang seumpunya. Islam tidak mengenal tindak kekerasan dalam pergaulan dengan penduduk agama-agama lain harus bersikap toleran.
- b. Islam memandang pemeluk-pemeluk agama lain terutama orang-orang keturunan ahli kitab, mempunyai persamaan landasan akidah yaitu sama-sama mempercayai Allah Yang Maha Esa.
- c. Islam mengulurkan tangan persahabatan terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, selama pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan tindakan permusuhan.
- d. Adanya diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan terhadap pemeluk agama lain (Sufianto, 2001, hal. 133-134).

Menurut Zakiyuddin Baidhawiy (2005, hal. 48-59) toleransi harus diwujudkan dalam realitas nyata, karena toleransi adalah ekspresi pemenuhan kebutuhan sosiologis dan menegaskan urgensi komitmen politis pada momentum pertikaian ideologis yang besar. Toleransi juga merupakan ekspresi tentang peninjauan ulang terhadap nilai-nilai yang khas bagi setiap kelompok masyarakat secara tajam. Penguatan toleransi di setiap tempat menuntut adanya dua syarat utama, yaitu keinginan individu akan toleransi dan keterkaitan kehendak individual dengan kehendak politis masyarakat pada suatu negara.

Sedangkan Harun Nasution mengatakan jiwa toleransi dapat dipupuk melalui usaha usaha sebagai berikut:

- a. Mencoba melihat kebenaran yang ada di agama lain.
- b. Memperkecil perbedaan yang ada.
- c. Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada.
- d. Memupuk rasa persaudaraan.
- e. Memusatkan usaha pada pembinaan individu-individu dan masyarakat yang menjadi tujuan agama.
- f. Mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi ber- agama.
- g. Menjauhi praktek serang menyerang antar agama.

Toleransi merupakan hal penting yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan agama baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

2. Saling Menghargai Perbedaan

Dalam pendidikan agama juga harus dikembangkan sikap saling menghargai perbedaan. Karena sikap ini akan membuat anak didik menghargai perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena salah satu problem keagamaan dewasa ini adalah ketegangan antara agama dan kebudayaan. Sebagian kalangan cenderung menolak mentah-mentah apa yang dianggap bukan bagian dari agama, sehingga muncul gerakan purifikasi atau puritalisasi agama. Gerakan ini cenderung mengambil jalan kekerasan dan tidak toleran terhadap sistem etika dan keagamaan di luar keyakinannya.

Untuk itu perlu dikembangkan sikap menghargai perbedaan dalam pendidikan agama di seluruh lembaga pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Musa Asy'ari mengatakan bahwa ajaran Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hubungan antar sesama manusia, saling menghormati dan menyayangi, dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Juga dianjurkan untuk tidak berbuat semena-mena pada orang lain. Orang Islam dianjurkan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, karena tingi rendahnya manusia di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh adanya realitas perbedaan dan pluralitas, tetapi oleh kadar ketakwaannya. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghargai perbedaan, saling hormat menghormati kepada sesama manusia sebagai perwujudan dari esensi ajaran Islam.

3. Kerjasama

Dalam pendidikan agama juga harus dikembangkan kerjasama antar berbagai kelompok sosial sehingga terjalin komunikasi dan harmonisasi dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Menurut Said Agil Al Munawar (2005,

hal. 37) bahwa keindahan masyarakat religius tercermin dalam kerjasama yang harmonis antar golongan dalam masyarakat itu sendiri. Kerjasama merupakan konsekuensi logis dari hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat yang diidamkan mustahil dapat terwujud tanpa didukung dengan kerjasama. Tiap anggota masyarakat harus merasa terpanggil serta mempunyai rasa tanggung jawab atas keutuhan dan kemajuan masyarakat.

Kerjasama ini merupakan hal mendasar yang harus diajarkan dalam proses pendidikan agama, sehingga agama menjadi pendorong terciptanya suatu masyarakat yang kuat dan tidak terbelenggu oleh nepotisme serta primordialisme.

4. Kerja keras

Kerja keras adalah ciri utama orang yang sukses. Peluang dan kesempatan hanya akan datang kepada orang yang berpredikat sebagai pekerja keras. Orang harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, agar dapat meraih keberhasilan hidup. Kerja keras muncul karena dorongan psikologis dalam diri yang merangsangnya untuk melakukan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, orang perlu mengatur pikiran, energi, waktu, tempat, dan sumber daya lainnya dengan baik agar semua dapat di arahkan dalam mencapai apa yang dicita-citakan (Mahfud, 2008, hal. 114). Pendidikan agama harus dapat mendorong seseorang menjadi pekerja keras, sehingga mereka menggunakan tenaga, akal pikiran, pengetahuan, etika pergaulan, semangat pantang menyerah dalam meraih cita-cita.

Islam adalah suatu agama yang menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja keras dan bersungguh-sungguh sehingga menjadi umat yang terbaik dan maju dalam segala bidang. Sikap kerja keras dan berusaha untuk mengubah nasib, rajin dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan merupakan anjuran dan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Agama Islam merupakan sumber motivasi dan gerak serta dinamika dalam mewujudkan etos kerja. Islam menyuruh seseorang untuk bekerja dan mengubah nasibnya sendiri.

Menurut Nurcholis Madjid, ada lima komponen dalam meningkatkan etos kerja yaitu:

- a. Niat sebagai dasar kerja.
- b. Menerapkan konsep ihsan dalam kerja.
- c. Menyadari bahwa kerja sebagai bentuk eksistensi manusia.
- d. Keyakinan bahwa orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah.
- e. Kerja keras sebagai bagian dari nilai-nilai multikulturalisme (Madjid, 1992, hal. 412-422)

Diharapkan dengan pengembangan pendidikan agama yang menerapkan prinsip-prinsip multikulturalisme di atas dapat menjadikan pendidikan agama lebih berperan, bermanfaat, dalam mengembangkan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan

Dalam masyarakat majemuk, prinsip-prinsip multikulturalisme menjadi hal yang harus diutamakan dalam rangka mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu pendidikan agama perlu mengembangkan dan memperkaya materi pendidikannya, meliputi ajaran tentang keharmonisan, toleransi, etika dan sopan santun, serta kemampuan memahami perbedaan dalam masyarakat majemuk. Sehingga peran pendidikan agama menjadi penting dalam membangun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2000). *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, H. (2009). *Multikulturalisme Dalam Islam*. Yogyakarta: Idea Press.
- Koentjoroningrat. (1972). *Pengantar Antropologi*. Jakarta.
- Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, C. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawar, S. A. (2005). *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Scharf, B. R. (1970). *The Sociological Study of Religion*. London: Hutchinson University Library.
- Schumann, O. (1993). *Pemikiran Keagamaan dalam Tantangan*. Jakarta: Gramedia.
- Sobur, A. (1986). *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa.
- Sufianto. (2001). *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suminto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Tilaar, H. A. (2004). *Multikulturalisme (Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan)*. Jakarta: Grasindo.

